Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat: Pendekatan Maqashid Syariah

SKRIPSI

SHOLEMAN

NIM. B1061221024

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Sholeman
NIM	:	B1061221024
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Judul Proposal	:	Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat: Pendekatan Maqashid Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 24 Juni 2026



Sholeman

NIM.B1061221024

LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sholeman
NIM	:	B1061221024
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Judul Proposal	:	Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat: Pendekatan Maqashid Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 24 Juni 2026



Sholeman

NIM.B1061221024

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat: Pendekatan Maqashid Syariah

Penanggung Jawab Yuridis

Sholeman
B1061221024

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Tgl Ujian Skripsi/Tugas Akhir	:	08 Mei 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si. NIP 196312091989031004	24 Juni 2026	
2.	Ketua Penguji	Dr. Hayet, S.E., M.E.I. NIP 198906212015041001	22/6-2026	
3.	Anggota Penguji	M. Iman Taufik, S.E., M.E. NIP 198611232022031002	22/6-2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi/Tugas Akhir

Pontianak, 02 JUL 2026
Koordinator Program Studi
Ekonomi Islam

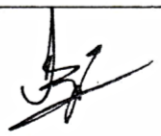
Rony Soradi, S.EI., M.E.
NIP 198610022019031004

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini, Dosen Pembimbing Akademik Skripsi mahasiswa:

Nama	:	Sholeman
NIM	:	B1061221024
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat: Pendekatan Maqashid Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.

	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Pembimbing Skripsi	Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si. NIP. 196312091989031004	23/04/2026	

UCAPAN TERIMAKASIH

Bissmillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam, atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta kemudahan yang tiada henti Ia karuniakan. Hanya ridho, kekuatan, dan izin dari-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Bonus Demografi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat: Pendekatan Maqashid Syariah". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, doa, dan bantuan moral maupun material. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, alm. Bapak dan Ibu tercinta beserta seluruh keluarga besar, yang selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan tempat penulis kembali. Terima kasih atas doa-doa tulus, dukungan moral maupun material, serta kasih sayang yang tidak pernah putus hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H, M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura, atas fasilitas dan lingkungan akademik yang diberikan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dengan baik.
3. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atas dukungan, kebijakan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada seluruh mahasiswa FEB.
4. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan IImu Ekonomi Studi Pembangunan, Serta Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam, atas arahan dan komitmen dalam memastikan kualitas akademik bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam.
5. Bapak Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, ketulusan, kesabaran, waktu, serta nasihat berharga yang diberikan

dalam mengarahkan penulis sejak awal masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi. Semoga segala ilmu dan kebaikan menjadi amal jariyah yang mendapatkan balasan terbaik dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

6. Bapak Dr. Hayet, S.E., M.E.I. dan Bapak M. Iman Taufik, S.E., M.E., selaku Dosen Penguji, atas kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di Program Studi Ekonomi Islam, atas ilmu, pengalaman, pelayanan akademik, dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Teman-teman Prodi Ekonomi Islam angkatan 2022, khususnya kelas B reguler A yang selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan kebersamaan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam lembaran ini. Segala bentuk kebaikan, doa tulus, serta dukungan sekecil apa pun telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rampungnya skripsi ini. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa membalas setiap kebaikan tersebut dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda, Aamiin.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis memohon doa agar segala ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan ini dapat bernilai ibadah, memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan keilmuan, serta menjadi kontribusi yang nyata di tengah masyarakat. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Pontianak, 24 Juni 2026



(Sholeman)
NIM.B1061221024

Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat: Pendekatan Maqashid Syariah

Oleh:

Sholeman

Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bonus demografi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat serta menguji peran Maqashid Syariah sebagai variabel moderasi. Bonus demografi diproksikan dengan rasio ketergantungan, sedangkan Maqashid Syariah diukur melalui indeks komposit. IPM dianalisis secara keseluruhan dan berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Penelitian ini menggunakan data panel 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat periode 2015–2024 dengan metode regresi data panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, Hal ini mengonfirmasi bahwa bonus demografi berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia, di mana penurunan beban ketergantungan akan mendorong peningkatan kualitas IPM. Sementara itu, Maqashid Syariah berpengaruh positif terhadap dimensi IPM. Namun, Maqashid Syariah tidak mampu memoderasi hubungan antara bonus demografi dan IPM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki pengaruh langsung, perannya sebagai variabel moderasi belum optimal. Oleh karena itu, pemanfaatan bonus demografi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan implementasi nilai-nilai Maqashid Syariah yang lebih efektif.

Kata Kunci: Bonus Demografi, Rasio Ketergantungan, Indeks Pembangunan Manusia, Maqashid Syariah, Data Panel, MRA

PENGARUH BONUS DEMOGRAFI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTAN BARAT: PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH

RINGKASAN

1. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Pembangunan manusia telah menjadi salah satu inti dari agenda dan prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah di Indonesia. Kesenjangan pembangunan manusia menjadi hambatan besar atas ketidakadilan sosial dan ketidakmerataan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kinerja pembangunan manusia yang berlandaskan tiga aspek: pengetahuan, umur panjang dan hidup sehat, serta standar hidup yang layak. IPM Kalimantan Barat menunjukkan ketimpangan antar kabupaten/kota dan peningkatan yang relatif lambat meskipun berada pada fase bonus demografi. Peningkatan IPM secara keseluruhan belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia di daerah tersebut. Hal ini disebabkan masih adanya kesenjangan antar kabupaten/kota, serta berbagai persoalan terkait kualitas sumber daya manusia yang belum merata.

Salah satu faktor utama yang berpotensi mempengaruhi peningkatan IPM di Kalimantan Barat adalah bonus demografi. Bonus demografi mengacu pada situasi saat jumlah penduduk dalam rentang usia produktif (15-64 tahun) melebihi jumlah penduduk usia non-produktif. Namun, jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas pada sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja, potensi bonus demografi tersebut tentu akan menjadi beban pembangunan.

Di sisi lain, indikator IPM belum sepenuhnya mampu merepresentasikan pembangunan manusia secara utuh, terutama dalam aspek moral, sosial, dan keberlanjutan kesejahteraan sebagaimana ditekankan dalam perspektif Islam. Oleh sebab itu, penerapan prinsip Maqashid Syariah dipandang penting dalam pembangunan manusia.

Tujuan Penelitian:

1) Untuk menganalisis pengaruh bonus demografi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat.
2) Untuk menganalisis pengaruh Maqashid Syariah terhadap setiap dimensi IPM (Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup) di Kalimantan Barat.
3) Untuk menganalisis peran Maqashid Syariah sebagai variabel Moderasi dalam hubungan antara bonus demografi dan setiap dimensi IPM (Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup) di Kalimantan Barat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat periode 2015–2024 dengan metode regresi data panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). IPM dianalisis menggunakan indeks komposit ketiga dimensi utamanya, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kontribusi masing-masing dimensi terhadap pembangunan manusia serta keterkaitannya dengan bonus demografi dan Maqashid Syariah.

3. Hipotesis Penelitian

H1: Bonus demografi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

H2: Maqashid Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap setiap dimensi IPM (Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup) di Kalimantan Barat.

H3: Maqashid Syariah memperkuat pengaruh positif Bonus demografi terhadap setiap dimensi IPM (Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup) di Kalimantan Barat.

4. Hasil Penelitian

1) Hipotesis 1 (H1): Hasil analisis data panel membuktikan bahwa rasio ketergantungan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai IPM. Secara ekonomi, hubungan terbalik ini menandakan bahwa semakin rendah beban tanggungan penduduk usia produktif, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Barat justru akan semakin meningkat. Oleh karena itu, Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini dinyatakan diterima, yang berarti

momentum bonus demografi terbukti memberikan kontribusi positif yang nyata bagi peningkatan kualitas IPM.

2) Hipotesis 2 (H2): Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid Syariah berpengaruh positif terhadap dimensi IPM, yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai kesejahteraan dalam Islam memiliki peran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengaruh tersebut terlihat pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini memperkuat bahwa pembangunan manusia tidak hanya bersifat material, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan spiritual.
3) Hipotesis 3 (H3): Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Maqashid Syariah tidak mampu memoderasi hubungan antara bonus demografi dan IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Maqashid Syariah memiliki pengaruh langsung terhadap pembangunan manusia, namun perannya sebagai variabel yang memperkuat hubungan antara bonus demografi dan IPM belum optimal. Dengan kata lain, penerapan nilai-nilai Maqashid Syariah belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi bonus demografi dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

5. Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bonus demografi yang diproksikan melalui rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat, Hal ini berarti semakin rendah beban ketergantungan (yang mengindikasikan optimalnya fase bonus demografi di mana proporsi usia produktif lebih besar), maka kualitas pembangunan manusia akan semakin meningkat..

Selanjutnya, Maqashid Syariah terbukti berpengaruh positif terhadap dimensi pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, sehingga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, Maqashid Syariah tidak mampu memoderasi hubungan antara bonus demografi dan pembangunan manusia, sehingga perannya lebih dominan sebagai variabel yang memiliki pengaruh langsung dibandingkan sebagai variabel moderasi.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan bonus demografi di Kalimantan Barat tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja. Tanpa adanya peningkatan kualitas tersebut, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban dalam pembangunan.

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai Maqashid Syariah sebagai dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran Maqashid Syariah sebagai variabel moderasi belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkret dalam mengintegrasikan nilai-nilai Maqashid Syariah ke dalam kebijakan pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, agar mampu mendukung pemanfaatan bonus demografi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMAKASIH i
ABSTRAK iii
RINGKASAN iv
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Kontribusi Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1. Landasan Teori 10
2.1.1. *Grand Theory* 10
2.1.2. Pembangunan Manusia 11
2.1.3. Bonus Demografi 13
2.1.4. Maqashid Syariah 14
2.2. Kajian Empiris 17
2.3. Kerangka Konseptual 25

BAB III METODE PENELITIAN 26
3.1. Bentuk Penelitian 26
3.2. Sumber Data 26
3.3. Variabel Penelitian 26
3.4. Metode Analisis Data 29
3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif 29
3.4.2. Analisis Regresi Data Panel 30
3.4.3. Uji Spesifikasi Model 32
3.4.4. Uji Asumsi Klasik 33
3.4.5. Uji Hipotesis 34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 35
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 35
4.2. Hasil Penelitian 36
4.3. Pembahasan 46
BAB V KESIMPULAN 51
5.1. Kesimpulan 51
5.2. Implikasi Penelitian 52
5.3. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya 53
DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN 60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 IPM Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 2
Tabel 1.2 Rasio Ketergantungan Kalimantan Barat 2020-2024..... 3
Tabel 3.1 Operasional Variabel 27
Tabel 3.2 Dimensi IPM 28
Tabel 3.3 Daftar Operasional Variabel Maqashid Syariah 28
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif 36
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Model 38
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas..... 40
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Hipotesis 1 42
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Hipotesis 2 42
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Hipotesis 3 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia telah menjadi salah satu inti dari agenda dan prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah di Indonesia. Kesenjangan pembangunan manusia menjadi hambatan besar atas ketidakadilan sosial dan ketidakmerataan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di tahun 1990, diperkenalkannya *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai tolak ukur untuk mengukur pembangunan manusia (Rukiah dkk., 2020).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kinerja pembangunan manusia yang berlandaskan tiga aspek: pengetahuan, umur panjang dan hidup sehat, serta standar hidup yang layak (Badan Pusat Statistik, 2025). IPM digunakan untuk mengetahui pola pertumbuhan manusia, termasuk posisi, pencapaian, serta tujuan dalam mengatasi kesenjangan regional. Dengan demikian, diharapkan setiap wilayah dapat mengejar peningkatan kualitas pembangunan manusia dengan mengembangkan kemampuan dasar masyarakat.

IPM Kalimantan Barat menunjukkan ketimpangan antar kabupaten/kota dan peningkatan yang relatif lambat meskipun berada pada fase bonus demografi. Peningkatan IPM secara keseluruhan belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia di daerah tersebut. Hal ini disebabkan masih adanya kesenjangan antar kabupaten/kota, serta berbagai persoalan terkait kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Kondisi ini terlihat dari perbedaan yang cukup mencolok antar daerah, di mana wilayah perkotaan seperti Pontianak dan Singkawang memiliki IPM yang relatif tinggi, sementara beberapa daerah perbatasan masih tertinggal, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia masih belum merata, padahal

pemerataan kualitas hidup merupakan aspek yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, terdapat disparitas IPM di antara 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

IPM Kalimantan Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Sambas	68,97	69,03	69,88	70,60	71,20
Bengkayang	67,87	68.04	68,74	69,53	70,30
Landak	66,10	66,33	67,28	68,22	69,13
Mempawah	66,71	67,00	67,91	68,91	69,63
Sanggau	66,73	67,18	67,87	68,73	69,40
Ketapang	68,13	68,39	68,86	69,61	70,34
Sintang	67,61	67,66	68,59	69,39	70,13
Kapuas Hulu	65,92	65,98	66,91	67,86	68,77
Sekadau	65,33	65,48	66,13	66,83	67,74
Melawi	65,74	66,06	66,99	67,92	68,81
Kayong Utara	63,97	64,18	65,09	66,06	67,05
Kubu Raya	68,89	69,09	69,83	70,50	71,14
Kota Pontianak	80,10	80,59	81,10	81,63	82,22
Kota Singkawang	72,73	72,90	73,66	74,13	74,68
Kalimantan Barat	**68,76**	**68,99**	**69,71**	**70,47**	**71,19**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa meskipun IPM Kalimantan Barat mengalami kemajuan dari tahun 2020-2024, terdapat perbedaan yang signifikan antar daerah. Kota Pontianak memiliki nilai tertinggi sebesar 82,22 di tahun 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang hanya 71,19. Sedangkan Kab Kayong Utara dan Kab Sekadau berada di peringkat terendah, dengan nilai IPM yang kurang dari 68. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan

dalam pembangunan manusia belum merata dan masih ada tantangan dalam pemerataan, baik dalam akses pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup yang layak di seluruh regional.

Salah satu faktor utama yang berpotensi mempengaruhi peningkatan IPM di Kalimantan Barat adalah bonus demografi. Bonus demografi mengacu pada situasi saat jumlah penduduk dalam rentang usia produktif (15-64 tahun) melebihi jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) (Umar, 2018). Menurut BPS Bonus demografi diperkirakan akan mencapai puncaknya di Indonesia pada saat periode 2020-2035. Situasi ini perlu dikaji lebih lanjut karena bonus demografi tidak selalu berdampak positif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Jika kualitas tenaga kerja rendah, peluang kerja terbatas, dan pembangunan tidak merata, jumlah penduduk usia produktif yang tinggi justru akan memperlebar kesenjangan antar regional. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian untuk melihat sejauh mana bonus demografi memengaruhi ketimpangan IPM di Kalimantan Barat.

Berikut merupakan tabel rasio ketergantungan proksi dari bonus demografi di Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat.

Tabel 1.2

Rasio Ketergantungan Kalimantan Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Sambas	48,34	48,19	48,07	48,23	48,17
Bengkayang	46,28	46,11	45,97	45,38	45,19
Landak	45,25	45,08	44,93	45,42	45,56
Mempawah	45,49	45,43	45,39	45,56	45,73
Sanggau	41,73	41,54	41,39	42,63	43,00
Ketapang	40,85	40,67	40,52	40,69	40,83
Sintang	46,37	46,19	46,03	45,95	45,81
Kapuas Hulu	44,60	44,36	44,16	44,06	44,01
Sekadau	44,25	44,09	43,96	44,40	44,50
Kabupaten/Kota	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**

Melawi	40,08	39,70	39,56	40,70	41,03
Kayong Utara	45,42	45,24	45,10	44,40	44,22
Kubu Raya	45,74	45,56	45,41	45,35	45,27
Kota Pontianak	45,01	44,89	44,79	44,84	44,82
Kota Singkawang	49,53	49,39	49,29	49,68	49,69
Kalimantan Barat	**44,87**	**44,70**	**44,56**	**44,78**	**44,83**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Pada tabel tersebut, data rasio ketergantungan menunjukkan bahwa mayoritas kab/kota di Kalimantan Barat berada pada rentang usia 40–49 tahun. Artinya, untuk 100 penduduk pada usia produktif, akan ada 40–49 penduduk pada usia non-produktif yang harus ditanggung. Situasi ini menunjukkan bahwa Kalimantan Barat sedang mengalami fase bonus demografi saat ini, di mana banyaknya jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi. Namun, jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas pada sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja, potensi bonus demografi tersebut tentu akan menjadi beban pembangunan.

Bonus demografi hanya akan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan manusia apabila diiringi dengan peningkatan kualitas penduduk usia produktif. Hubungan antara bonus demografi dan IPM tidak terjadi secara langsung, melainkan sangat bergantung pada kualitas pembangunan manusia itu sendiri serta nilai dan tujuan yang mendasarinya. Namun, tidak semua daerah mampu memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Tanpa didukung pada kualitas sumber daya manusia yang memadai, kondisi ini justru berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya pengangguran dan kesenjangan pembangunan. Di sisi lain, meskipun IPM telah mencakup aspek pendidikan dan kesehatan, indikator ini belum sepenuhnya mampu merepresentasikan pembangunan manusia secara utuh, terutama dalam aspek moral, sosial, dan keberlanjutan kesejahteraan sebagaimana ditekankan dalam perspektif Islam.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Parwodiwiyono & Witono, (2022) mengenai rasio ketergantungan menunjukkan adanya kecenderungan bahwa wilayah dengan rasio ketergantungan yang rendah nilai IPM-nya cenderung tinggi, sedangkan pada wilayah dengan rasio ketergantungan tinggi justru menunjukkan nilai IPM yang rendah. Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa beban ketergantungan berhubungan dengan capaian IPM. Sejalan dengan itu, penelitian Cahyani, dkk., (2024) yang menggunakan metode kuantitatif juga menemukan bahwa rasio ketergantungan memengaruhi IPM secara signifikan dengan arah yang negatif.

Di dalam Islam, fokus utama pembangunan adalah menyediakan lingkungan yang di mana memungkinkan untuk semua orang dapat menikmati kesejahteraan spiritual, moral, dan sosial-ekonomi di dunia ini, serta mencapai kesuksesan di akhirat. Konsep kesejahteraan ini disebut juga dengan falah. Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan, kesejahteraan ini diukur tidak hanya keberhasilan di dunia namun juga di akhirat (Rukiah dkk., 2020).

Sebagaimana di dalam (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 172) dan (QS. Ar-Ra'd 13: Ayat 11).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ١٧٢

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya*.

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ١١

Artinya: *Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Menurut tafsir Ibnu Katsir pada QS. Al-Baqarah ayat 172 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk mengonsumsi rezeki yang halal dan baik serta mensyukurinya. Halal tidaknya makanan sangat berpengaruh pada diterima atau tidaknya doa dan ibadah; rezeki yang baik mendukung keduanya, sedangkan yang haram justru menjadi penghalang. Sementara itu, menurut tafsir Jalalain pada QS. Ar-Ra'd ayat 11 menerangkan bahwa manusia selalu berada dalam pengawasan malaikat atas perintah Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah kondisi dalam diri mereka. Jika mereka berbuat buruk, maka akibatnya pun tidak dapat dihindari tanpa pertolongan Allah.

Konsep falah selaras dengan ajaran Al-Qur'an. Hal ini selaras dengan QS. Al-Baqarah ayat 172 yang menekankan pentingnya kualitas dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta QS. Ar-Ra'd ayat 11 yang menjelaskan bahwa perubahan kondisi suatu kaum sangat bergantung pada usaha mereka dalam memperbaiki diri. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak semata dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kualitas perilaku, kesadaran, serta tanggung jawab baik secara individu maupun bersama-sama.

Selain itu, nilai-nilai spiritual dan etika yang diusung oleh Maqashid Syariah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Maqashid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia: jiwa, agama, keturunan, akal dan harta (Bahtiar & Hannase, 2021). Konsep maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan mendasar yang menjadi tujuan dalam Islam untuk mewujudkan dan menjaga kebaikan bagi umat manusia. Menurut Imam Ghazali, maqashid syariah merupakan tujuan dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT dari setiap hukum pada keseluruhan hukumnya. Tujuan utama dari syariah adalah mewujudkan kemaslahatan untuk manusia dan menghilangkan kemudharatan (Paryadi, 2021). Dalam konteks pembangunan, penerapan Maqashid Syariah dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan tetap memperhatikan aspek moral dan etika. Oleh sebab itu, penerapan prinsip Maqashid Syariah tidak hanya

sejalan dengan konsep pembangunan manusia, tetapi juga dapat memperkuat atau bahkan melemahkan pengaruh bonus demografi terhadap IPM, tergantung pada sejauh mana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Hasil penelitian dari Haraki, E,. dkk. (2024) menunjukkan bahwa pada setiap aspek Maqashid Syariah, terdapat Zakat pada iman (din), Tingkat Kemiskinan pada Kehidupan Manusia (Nafs), Tingkat Literasi pada Intelektual ('Aql), Tingkat Kematian pada Keturunan (Nasl), dan Tingkat Ketenagakerjaan pada Kekayaan (Maal), yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Indeks Persepsi Korupsi (diin), Harapan Hidup (Nafs), Tingkat Pengeluaran Pendidikan ('Aql), Tingkat Kelahiran (Nasl), dan Pendapatan Domestik Bruto per Kapita (Maal) tidak mempengaruhi IPM. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi pada dimensi maqashid syari'ah terhadap pembangunan manusia masih kompleks . Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradita,. & Darwanto., (2025) menunjukkan dampak positif dan signifikan pada IPM dari empat dimensi: Din, Nafs, Nasl dan Maal, sementara perlindungan akal (Aql) menunjukkan pengaruh negatif.

Bloom, Canning, & Sevilla, (2003) menegaskan bahwa bonus demografi hanya dapat dimanfaatkan dengan optimal apabila jika disertai peningkatan investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja. Investasi tersebut selanjutnya diharapkan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian empiris (Syamsidduha, & Harmadi, 2024) di Jawa Timur mengonfirmasi hal ini, dengan temuan bahwa bonus demografi secara signifikan memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia melalui peningkatan proporsi penduduk usia kerja produktif. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya hifzh al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifzh al-'aql (perlindungan akal), yang menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup umat

Di Kalimantan Barat, yang memiliki populasi mayoritas Muslim, nilai-nilai Maqashid Syariah sering menjadi rujukan dalam berbagai kebijakan sosial dan

ekonomi. Penelitian yang mengkaji bagaimana Maqashid Syariah memoderasi hubungan antara bonus demografi dan IPM menjadi penting, terutama untuk mengetahui apakah penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat dampak positif bonus demografi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini relevan mengingat pengaruh agama yang kuat dalam struktur sosial Kalimantan Barat, yang menjadikan penerapan syariah sebagai faktor penting dalam pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana bonus demografi dapat berkontribusi terhadap peningkatan IPM di Kalimantan Barat, serta menganalisis bagaimana peran moderasi Maqashid Syariah dalam memperkuat atau melemahkan pengaruhnya. Hasil penelitian dapat diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengelola bonus demografi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka permasalahan pada penelitian ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh bonus demografi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat?
2. Bagaimana pengaruh Maqashid Syariah terhadap setiap dimensi IPM (Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup) di Kalimantan Barat?
3. Apakah Maqashid Syariah memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh bonus demografi terhadap setiap dimensi IPM (Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup) di Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh bonus demografi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Maqashid Syariah terhadap setiap dimensi IPM (Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup) di Kalimantan Barat.
3. Untuk menganalisis peran Maqashid Syariah sebagai variabel Moderasi dalam hubungan antara bonus demografi dan setiap dimensi IPM

(Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup) di Kalimantan Barat.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

1.4.1.1. Menambah pemahaman mengenai hubungan antara bonus demografi dan IPM dengan memasukkan Maqashid Syariah sebagai variabel moderasi, memberikan perspektif baru dalam studi pembangunan manusia.

1.4.1.2. Mengisi kekosongan literatur tentang penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam pembangunan manusia, menawarkan model moderasi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kontribusi Praktis

1.4.2.1. Memberikan panduan pada pembuat kebijakan di Kalimantan Barat guna merumuskan strategi kebijakan pembangunan lebih efektif dan inklusif, melalui pemanfaatan potensi bonus demografi dan Maqashid Syariah.

1.4.2.2. Membantu merancang strategi untuk mengatasi disparitas IPM antar kabupaten/kota, serta meningkatkan kualitas hidup secara lebih merata.

1.4.2.3. Menunjukkan bagaimana nilai-nilai Maqashid Syariah dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan keberhasilan dan penerimaan program-program pembangunan.

1.4.3. Kontribusi Agamis

1.4.3.1. Memperkuat pemahaman bahwa proses pembangunan harus didasari oleh nilai-nilai spiritual dan moral dalam Islam melalui prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

1.4.3.2. Memberikan kontribusi pada penelitian keilmuan Islam dengan menjadikan agama sebagai landasan dalam kebijakan pembangunan manusia.